

Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda Dalam Mewujudkan Keadilan Keberlanjutan Di Indonesia

Fatika Redita Suryadarma¹⁾, Pujiyono Suwandi²⁾

Universitas Sebelas Maret
fatikaredita@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Sebagai landasan fundamental masyarakat, hukum harus melindungi martabat manusia dan menghindari tindakan yang merendahkan, serta memastikan tidak ada kelompok yang dirugikan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan hukum untuk membentuk generasi muda yang mampu menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, meskipun kurikulum hukum telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip keadilan sosial, masih ditemukan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah pendidikan hukum harus diintegrasikan dengan prinsip keberlanjutan untuk menyiapkan generasi muda yang sadar hukum dan dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Kata Kunci

Pendidikan hukum; Generasi muda; Masyarakat

As a fundamental foundation of society, the law must protect human dignity and prevent degrading actions, ensuring that no group is disadvantaged. Therefore, legal education is required to shape young generations capable of addressing social, economic, and environmental issues. In Indonesia, although the legal curriculum has been designed to accommodate the principles of social justice, challenges in its implementation are still encountered. This study employs a normative research method using a literature review. The findings of this research indicate that legal education must be integrated with sustainability principles to prepare a legally aware younger generation that can contribute positively to society.

Keywords

Legal education; Younger generation; Society



PENDAHULUAN

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan haruslah memberikan perlindungan yang sama kepada semua orang tanpa pandang bulu demi memastikan bahwa masyarakat hidup dalam sebuah negara yang adil dan demokratis (Utama, 2019). Hukum harus menjamin kemanusiaan dalam menjalakan segala aktivitasnya. Hal ini berarti hukum harus melindungi martabat manusia dan menghindari adanya perlakuan yang merendahkan manusia atau menimbulkan penderitaan. Hukum juga harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan kelompok tertentu dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Cahyalaguna & Putri, 2023).

Sebagai landasan fundamental yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum tentunya harus dipelajari dengan teliti demi kelangsungan hidup suatu negara. Pendidikan hukum menjadi salah satu pengetahuan dasar dalam rangka membentuk generasi muda yang dapat berkolaborasi dalam menangani tantangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hukum, misalnya isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada era globalisasi yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, maka perlu diimbangi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan pada kurikulum pendidikan.

Berbicara tentang pendidikan hukum di Indonesia, esensi pendidikan hukum tentu sudah banyak direfleksikan dalam bingkai keadilan sosial. Kurikulum hukum telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial, meskipun pada kenyataannya masih banyak ditemui tantangan dalam implementasi yang dihadapi oleh institusi pendidikan. Pengajaran dan pembelajaran telah difokuskan untuk membekali siswa dengan pemahaman mendalam mengenai isu-isu keadilan sosial, sehingga kontribusi mereka terhadap masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam menjalankan fungsinya dalam menegakkan keadilan, hukum harus memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada semua manusia tanpa pandang ras, agama, atau jenis kelamin. Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara.

Pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum pada generasi muda Indonesia. Pengenalan hukum hendaknya dilakukan sejak usia dini, dengan begitu diharapkan anak-anak dan remaja dapat mengembangkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum ini juga bertujuan untuk menjadikan generasi muda yang taat hukum dan bertanggung jawab di masa depan.

Proses Pendidikan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab. Diharapkan dengan pemahaman hukum yang baik, generasi

muda diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, sekolah, dan orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Pemerintah dapat mendukung dengan menyusun kebijakan pendidikan yang memasukkan pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, dapat mengintegrasikan materi hukum dalam berbagai mata pelajaran atau melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, orang tua dapat mendukung dengan menyediakan lingkungan rumah yang mendorong diskusi dan pemahaman tentang hukum.

Perubahan dalam pendekatan pendidikan hukum telah didorong oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan-tantangan sosial yang kompleks. Inisiatif-inisiatif baru telah diperkenalkan, dan praktik-praktik terbaik dari berbagai negara telah diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, resistensi terhadap perubahan kurikulum masih sering ditemukan, yang menunjukkan bahwa usaha lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian studi kepustakaan. Penelitian normatif dilakukan berdasarkan inventarisasi materi-materi hukum, informasi yang terdapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku bacaan, dan artikel yang berkaitan (Soekanto, 2007). Pendekatan ini berfokus pada analisis konsep dan prinsip hukum berdasarkan literatur yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan karya ilmiah terkait. Tujuan dari penelitian ini ialah menjabarkan tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan hukum bagi generasi muda dalam mewujudkan keadilan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, dampak dari pergeseran dan perubahan sistem hukum akibat dinamika politik, sosial, dan ekonomi global, memerlukan perubahan yang mendasar untuk menyelaraskan dan menyesuaikan realitas hubungan antar manusia yang kini banyak didominasi oleh aktivitas di dunia maya. Hukum menjadi alat yang penting dan strategis dalam mengatur ruang interaksi sosial, berbagai perubahan pranata sosial dan kelembagaan pada era sekarang.



Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia tentunya mengalami berbagai tantangan di berbagai sektor, seperti sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, administrasi, dan kesehatan. Percepatan perkembangan dunia memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional, mengharuskan negara untuk beradaptasi dengan cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. SDGs berfungsi sebagai kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan merata. Tantangan yang dihadapi mencakup tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan mutu pendidikan dan sistem kesehatan, serta penegakan hukum yang efektif dan adil.

Dalam rangka upaya mencapai tujuan SDGs, selain tiga hal pokok yang berkaitan dengan hukum yaitu peraturan, lembaga hukum, dan regulasi, perlu pula diperhatikan dan dikembangkannya pendidikan hukum sebagai pengetahuan budaya baru (Christmas, et., al., 2020). Hal ini penting karena hukum tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan peraturan tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan budaya di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diintegrasikan dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik. Pengembangan hukum yang adaptif dan relevan dengan perubahan global akan membantu menciptakan konsensus tujuan global yang dapat diadopsi oleh masyarakat, organisasi, dan pemerintah. Maka dengan demikian, hukum berperan menjadi perekat dalam dunia yang saling terhubung, terutama dalam era digital dan intergrasi global.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat berfungsi sebagai pengatur tatanan sosial. Seperti halnya istilah yang terkenal di bangsa romawi, yakni *ubi societas ibi ius* yang berarti eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum sebagai pengatur masyarakat, hanya dapat ditegakkan apabila peran aparat penegak hukum memiliki sifat kompeten, kredibilitas dan mandiri. Sebaik-baiknya hukum yang telah disusun, apabila tidak diiringi dan didukung dengan aparat penegak hukum yang kompeten, maka keadilan tidak akan terwujud.

Penerapan dan penegakan hukum yang adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah, sehingga hal tersebut dapat menaikkan partisipasi rakyat dalam menjaga keharmonisan hukum dan masyarakatnya. Keadilan dalam hal ini bukan hanya sebuah hak, melainkan pula tanggung jawab setiap orang untuk memastikan prinsip keadilan dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga



negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan hak yang sama untuk diperlakukan secara adil (Nurtresna & Mabsuti, 2024).

Seperti yang kita ketahui, bawasannya keadilan sosial merupakan salah satu dari tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial diakui sebagai hak bagi setiap warga negara. Keadilan sosial tertuang dalam Pancasila, tepatnya pada sila ke-5 yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sehingga setiap orang dapat mencapai kehidupan yang layak dan berkontribusi terhadap kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Menempatkan pendidikan hukum sebagai bagian dari sistem hukum adalah hal yang mendasar dari suatu negara. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan hukum dapat tersusun secara terpadu dan fungsional, baik dalam segi teoritis maupun praktis. Selama ini, pendidikan hukum sering dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri. Akibatnya, pendidikan hukum dan produk hukum yang dihasilkannya kurang efektif dalam mengembangkan dan melengkapi elemen lain dari sub sistem hukum. Meskipun telah ada berbagai pendekatan dan upaya baru untuk menyusun struktur dan isi pendidikan yang inovatif, tetap saja belum mampu menghapus keterpisahan dengan elemen-elemen lain dalam sistem hukum. Pendidikan hukum memegang peranan utama dalam pembentukan suatu masyarakat yang adil berkelanjutan. Dengan kualitas pendidikan hukum yang baik, lahir para ahli hukum yang memiliki pengetahuan hukum teoritis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan keadilan di berbagai konteks sosial.

Pendidikan hukum jugda dianggap berperan penting dalam pembentukan karakter dan etika para ahli hukum yang akan menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan berintegritas. Berdasarkan artikel di Hukum online berjudul "*Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia*", pendidikan hukum di Indonesia harus terus berkembang agar responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi sehingga mampu menjawab tantangan global dan lokal secara efektif. Pendidikan hukum yang baik tidak hanya mendukung penegakan hukum yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Implementasi pendidikan hukum berbasis keberlanjutan di Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan yang rumit. Salah satu tantangan utamanya ialah penyesuaian kurikulum pendidikan hukum dengan kebutuhan zaman yang semakin berubah di tengah perkembangan teknologi dan dinamika global.

Pendidikan hukum harus menyesuaikan kurikulum hukum dengan kebutuhan modern, yang mencakup pemahaman mendalam tentang isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Seperti diungkapkan dalam sebuah laporan oleh IDLO, banyak fakultas hukum di Indonesia yang masih perlu meningkatkan pendekatan pendidikan hukum mereka agar lebih sesuai dengan praktik hukum yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hukum perlu lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan tersebut secara efektif.

Perubahan yang cepat menuntut agar kurikulum pendidikan hukum dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hukum secara teoretis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk menghadapi tantangan nyata di masyarakat. Pendidikan hukum berperan dalam menyiapkan para profesional yang siap berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan pendidikan hukum yang terintegrasi, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan hukum mencakup isu-isu aktual dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan, sementara praktisi hukum dapat memberikan wawasan praktis dan pengalaman lapangan yang berharga. Di sisi lain, masyarakat dapat berperan dalam memberikan masukan dan umpan balik tentang bagaimana hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Kolaborasi tersebut dapat menghasilkan sistem pendidikan hukum yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam konteks nyata. Sehingga kedepannya, generasi muda yang dihasilkan siap menghadapi tantangan dalam praktik hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan efektif.

Pendidikan hukum juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di mana generasi muda hidup. Hukum tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi generasi muda tentang hukum yang berlaku di negara mereka, serta bagaimana hukum tersebut berfungsi untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke pengadilan atau lembaga hukum lainnya, dapat memberikan pengalaman langsung yang akan memperkaya pemahaman mereka tentang sistem hukum.

Pengembangan karakter juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya tentang mengetahui aturan, tetapi juga tentang membangun sikap menghargai dan patuh pada hukum. Mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti

kampanye kesadaran hukum, merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan tersebut, mereka akan menyadari bahwa hukum bukan hanya sekadar norma yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Pendidikan hukum yang berkualitas adalah kunci untuk membangun sistem hukum yang kuat dan berintegritas. Pendidikan yang tepat dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya menjadi penegak hukum yang cerdas, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong reformasi hukum dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan hukum yang baik merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pengajaran yang komprehensif dan berfokus pada pengembangan keterampilan analitis dan etis, generasi muda diharapkan dapat menghadapi tantangan hukum yang kompleks dan dinamis. Selain itu, dengan kurikulum yang terintegrasi dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia dan lingkungan, pendidikan hukum dapat menghasilkan profesional yang siap berpartisipasi dalam diskusi internasional dan mengambil peran aktif dalam memajukan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Pendidikan hukum yang berkualitas adalah kunci untuk membangun sistem hukum yang kuat dan berintegritas, serta memainkan peran utama dalam pembentukan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan hukum harus merangkul perubahan cepat dengan menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan modern, mencakup isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Implementasi pendidikan hukum berbasis keberlanjutan menghadapi tantangan yang rumit, namun dengan kolaborasi antara pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat, pendidikan hukum dapat menjadi relevan dan aplikatif dalam konteks nyata. Hal ini akan memastikan bahwa generasi muda siap menghadapi tantangan dalam praktik hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan efektif, serta berperan aktif dalam memajukan keadilan sosial di tingkat nasional dan internasional.

REFERENSI

- Cahyalaguna, A. R., & Putri, S. N. R. (2023). Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 1-9.
- Christmas, S. K., Muhajir, I., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and SDGs. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 108-117.

- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1581-1596.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, Rajawali Pers.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.